

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah suatu kumpulan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayahnya masing-masing dan memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam mengurus dan mengatur segala urusan pemerintah, kepentingan dan tujuan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Permendagri No. 113, 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam aktivitas pengelolaan keuangan di setiap desa karena didalam peraturan tersebut telah mencakup berbagai tata cara atau prosedur terkait pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Saat ini masalah mengenai kualitas laporan keuangan banyak diperbincangkan, karena beberapa temuan pada perusahaan di Indonesia tentang kasus buruk kualitas laporan keuangan yang perlu dikaji lebih dalam. Kualitas laporan keuangan ini dapat di lihat bagaimana kinerja lembaga tersebut. Kinerja pemerintahan yang baik bisa dinilai dari *input*, *output*, serta *outcome*, secara

bersama- bersama, dimana alokasi bayaran serta pelayanan yang menekankan pada 3 elemen utama, ekonomi, efisiensi, serta daya guna. Guna untuk meningkat kinerja pemerintah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengendalian internal, pengontrolan praktis dan penerapan sistem informasi dalam akuntansi. Mengenai laporan keuangan desa yang perlu disusun sebagai suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak desa dalam bentuk Dana Desa dan juga sebagai sarana informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yakni masyarakat desa, pemerintah kabupaten/daerah, hingga pemerintah pusat. Namun kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih sangat minim jika di terapkan dalam era globalisasi seperti saat ini, terlebih pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di desa tentunya mengharuskan laporan keuangan desa harus disusun secara sederhana sehingga memudahkan para aparatur desa di dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga penguasaan sistem informasi akuntansi penting untuk pengelola keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang secara garis besar pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena

itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik agar terhindar dari kegiatan korupsi/penggelapan dana keuangan desa. Laporan keuangan merupakan salah satu media pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik yang berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk dimasa yang akan datang, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga hasil dari publikasi laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang memiliki nilai dan informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya. Kualitas laporan keuangan yang baik itu adalah disajikan sesuai dengan yang direalisasikan, dan disusun sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap desa. Menurut pendapat Rita, Sutandar dan Zulfadli (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu: 1) latar belakang pendidikan; 2) tingkat pendidikan; 3) keikutsertaan dalam diklat tentang penyusunan laporan keuangan daerah.

Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan dana desa memberikan peluang bagi penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Kurangnya kepedulian dari pihak kecamatan dalam penyusunan laporan keuangan, juga mengakibatkan peluang dalam hal ini. Masih banyak kepala desa

dan perangkat dibawahnya yang masih awam dalam menyusun pelaporan keuangan dana desa, sehingga berakibat munculnya kesalahpahaman. Hal ini dibenarkan dengan pendapat bapak Tgk. Syarkawi selaku Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah pada saat itu yang mengatakan bahwa:

“Kadang-kadang pengerjaannya sudah bagus, perencanaannya sudah bagus, tapi pelaporannya tidak benar. Akhirnya bermasalah. Maka disinilah saya harap pendamping harus melakukan pendampingan dengan benar” (Antarnews Aceh, 2018).

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pendapat beberapa Kepala Kampung di Kecamatan Timang Gajah, Bapak *Reje* Kampung Damaran Baru beserta beberapa aparaturnya yang berada di tempat, bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban desa seringkali mengalami kesalahan yang dikarenakan oleh kurangnya pemahaman perangkat desa akan hal ini. Oleh sebab itu kesalahan yang kerap terjadi yaitu kurangnya kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan” Irwandi. (2024, Maret 25).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh karena apabila terjadi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan maka informasi yang disajikan juga akan salah dan itu akan menyulitkan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkannya.

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah SIA (Sistem Informasi Akuntansi), sebuah Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan memberikan kontribusi yang positif dalam menghasilkan laporan keuangan dana desa yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh para *stakeholders*

terkait. Melalui pengelolaan data yang akurat, pelacakan transaksi keuangan, integrasi proses keuangan, pengendalian internal, pemakaian teknologi yang tepat, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan pelaporan yang komprehensif, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat memastikan bahwa laporan keuangan dana desa menjadi lebih andal, transparan, dan dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan oleh Triyani dan Tubarad (2018), serta penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, vonna dan Harmi (2022), memberikan hasil yang sama bahwasannya SIA (Sistem Informasi Akuntansi) ini akan mencerminkan kualitas laporan keuangan yang baik, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada *input* yang baik, proses yang baik dan *output* yang baik juga. Sedangkan penelitian yang oleh Tarigan dan Sari (2021), bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak sama sekali mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan, yang artinya sistem yang digunakan sama sekali tidak mempengaruhi dan merubah kualitas dari laporan keuangan daerah yang diteliti.

Pembuatan laporan keuangan desa juga tidak hanya menyangkut perlunya sistem informasi dan *software* akuntansi khusus yang memadai, namun juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi. “Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi” (Sembiring, 2013). Disetiap organisasi Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan organisasi tersebut mencapai tujuannya karena tanpa adanya

sumber daya manusia organisasi tidak akan berjalan. Kompetensi yang tinggi di suatu lembaga atau organisasi pemerintahan dapat menentukan kualitas sumber daya manusia. Wati (2014) juga berpendapat serupa, bahwa Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017) dan Tawaqal et al (2017) memberikan hasil yang sama yang dimana kompetensi sumber daya manusia mencerminkan tingkat keberhasilan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, artinya semakin bagus kompetensi sumber daya manusianya maka semakin bagus pula tingkat kualitas laporannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) berdasarkan dari hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia tidak mencerminkan kualitas daripada laporan keuangan.

Kemudian tidak luput akan Partisipasi masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, proses operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, handal serta bertanggungjawab. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa maka akan meningkatkan pula keefektifan laporan keuangan desa beserta pengelolaannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2022) dan Pratiwi et al (2022) bahwa partisipasi masyarakat ini mencerminkan kualitas laporan keuangan desa. Dimana masyarakat juga memiliki hak dalam

bersuara, jika ada penyalahgunaan dan penyelewengan akan dana desa masyarakat boleh mengemukakan keluhannya.

Selain itu, hal terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran, menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Triyani dan Tubarad (2018), Tawaqal et al (2017), dan Shobatussa'adah dan Nasrullah (2021) pengendalian internal mencerminkan seberapa baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan artinya semakin baik sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atharrizka et al (2021) bahwa pengendalian internal itu tidak mencerminkan kualitas dari

laporan keuangan, yang berarti pengendalian internalnya tidak mempengaruhi akan baik buruknya kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Data dari Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Dana Kampung tahun anggaran 2023.

Tabel 1.1.
Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) Kecamatan Timang Gajah
Tahun Anggaran 2023

No	Nama Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah
1.	Bandar Lampahan	241.800.000	2.627.863	2.535.332
2.	Blang Rongka	304.200.000	2.627.863	2.535.332
3.	Cekal Baru	279.000.000	2.627.863	2.535.332
4.	Gegur Sepakat	211.200.000	2.627.863	2.535.332
5.	Karang Jadi	229.800.000	2.627.863	2.535.332
6.	Lampahan	248.400.000	2.627.863	2.535.332
7.	Setie	211.200.000	2.627.863	2.535.332
8.	Simpang Layang	229.800.000	2.627.863	2.535.332
9.	Suka Damai	211.200.000	2.627.863	2.535.332
10.	Tunyang	229.800.000	2.627.863	2.535.332
11.	Datu Beru	211.200.000	2.627.863	2.535.332
12.	Kenine	229.800.000	2.627.863	2.535.332
13.	Rembune	211.200.000	2.627.863	2.535.332
14.	Damaran Baru	229.800.000	2.627.863	2.535.332
15.	Fajar Harapan	229.800.000	2.627.863	2.535.332
16.	Mude Benara	211.200.000	2.627.863	2.535.332
17.	Kampung Baru 76	229.800.000	2.627.863	2.535.332
18.	Pantan Pediangan	211.200.000	2.627.863	2.535.332
19.	Bumi Ayu	229.800.000	2.627.863	2.535.332
20.	Kolam Para Kanis	211.200.000	2.627.863	2.535.332
21.	Mekar Ayu	229.800.000	2.627.863	2.535.332
22.	Lampahan Barat	248.400.000	2.627.863	2.535.332
23.	Lampahan Timur	229.800.000	2.627.863	2.535.332
24.	Timang Rasa	192.600.000	2.627.863	2.535.332
25.	Gunung Tunyang	229.800.000	2.627.863	2.535.332

No	Nama Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah
26.	Bukit Tunyang	211.200.000	2.627.863	2.535.332
27.	Linung Bale	229.800.000	2.627.863	2.535.332
28.	Pantan Kemuning	267.000.000	2.627.863	2.535.332
29.	Sumber Jaya	267.000.000	2.627.863	2.535.332
30.	Bukit Mulie	248.400.000	2.627.863	2.535.332

Sumber: Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2023

Berikut dana desa tertinggi dan terendah di kecamatan Timang Gajah tahun anggaran 2023:

Tabel 1.2.
Dana Desa Tertinggi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023

Nama Desa	Jumlah Anggaran
Blang Rongka	723.570
Cekal Baru	949.615
Lampahan	867.585
Suka Damai	709.734
Datu Beru	739.780
Kulem Parakanis	702.732
Lampahan Barat	895.038
Lampahan Timur	924.342
Pantan Kemuning	796.826

Sumber: Data diolah, Tahun (2024)

Tabel 1.3.
Dana Desa Terendah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023

Nama Desa	Jumlah Anggaran
Bandar Lampahan	631.880
Gegur Sepakat	639.221
Karang Jadi	641.458
Setie	591.426
Simpang Layang	632.101
Tunyang	658.546
Kenine	644.348
Rembune	625.772
Damaran Baru	658.965
Fajar Harapan	687.512
Mude Benara	567.455
Kampung Baru 76	684.746
Pantan Pendiangan	624.461
Bumi Ayu	682.331

Nama Desa	Jumlah Anggaran
Mekar Ayu	640.256
Timang Rasa	615.380
Gunung Tunyang	664.226
Bukit Tunyang	639.954
Linung Bale	617.013
Sumber Jaya	699.387
Bukit Mulie	676.359

Sumber: Data diolah, Tahun (2024)

Berdasarkan data diatas Belanja kampung ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan penulis tertarik mendeskripsikan sejauh mana kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa di Kecamatan Timang Gajah yang dipilih penulis sebagai penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?

3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Timang Gajah?
4. Bagaimanakah pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
5. Bagaimanakah pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Timang Gajah?
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan

Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di
Kecamatan Timang Gajah?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi,

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dan referensi dalam melakukan penelaahan serta pengkajian lebih lanjut mengenai masalah yang sama. Juga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca sebagai bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan pada pemerintah desa.

2. Bagi Praktisi,

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemerintah desa di Kecamatan Timang Gajah, baik berupa masukan atau pertimbangan mengenai SIA, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa agar menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Pihak Lain,

Sebagai referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, terkhusus mengenai laporan keuangan pemerintah desa dan topik-topik yang dibahas dalam penelitian.